



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 8101150107XXXXXX, TTL Negeri Lima, 01 Juli 1953, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 8101154107XXXXXX, TTL Negeri Lima, 19 November 1968, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.P/2020/PA.Ab, tanggal 26 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 08 April 1980 secara syariat islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 5 Orang Anak masing-masing bernama ;
 - a. Anak I, Laki-laki, umur 30 Tahun
 - b. Anak II, Perempuan, umur 26 Tahun
 - c. Anak III, Laki-laki, umur 21 Tahun
 - d. Anak IV, Perempuan, umur 19 Tahun
 - e. Anak V, Laki-laki, umur 3 Tahun

Dan kelima anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah HAMS selaku petugas nikah Pemohon II dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak TS selaku ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak HMHU dan Bapak HASM;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 08 April 1980 sesuai Syariat Islam ;
3. Menetapkan biaya perkara diatur oleh hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Staf Desa Negeri Lima, bertempat tinggal di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II bukan hubungan keluarga, namun sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Negeri Negeri Lima pada tanggal 08 April 1980 atas persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama bapak TS dan yang menikahkan ialah bapak HAMS selaku Petugas Nikah;
 - Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab Kabul antara wali nikah dengan mempelai pria;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bapak HMHU dan Bapak HASM;
 - Bahwa yang menjadi maskawin pada Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut ada dilaksanakan pesta nikah yang dihadiri oleh keluarga dan para undangan;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penghulu Masjid, bertempat tinggal di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II bukan hubungan keluarga, namun sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Negeri Negeri Lima pada tanggal 08 April 1980 atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah statusnya Perjaka dan Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama bapak TS dan yang menikahkan ialah bapak HAMS selaku Petugas Nikah;
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab Kabul antara wali nikah dengan mempelai pria;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bapak HMMHU dan Bapak HASM;
- Bahwa yang menjadi maskawin pada Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut ada dilaksanakan pesta nikah yang dihadiri oleh keluarga dan para undangan;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mendailinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinan mereka diistbatkan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini adalah sebagaimana posita nomor 1 sampai dengan 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1980 telah terjadi pernikahan di Negeri Negeri Lima antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan seorang perempuan **Pemohon II** (Pemohon II) yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Masjid Negeri Negeri Lima Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **TS**;
3. Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak HMHU dan Bapak HASM;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak I, Laki-laki, umur 30 Tahun;
 - b. Anak II, Perempuan, umur 26 Tahun;
 - c. Anak III, Laki-laki, umur 21 Tahun;
 - d. Anak IV, Perempuan, umur 19 Tahun;
 - e. Anak V, Laki-laki, umur 3 Tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
8. Bahwa selama perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah sesuai dengan Hukum Munakahat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1)

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut yang telah dilaksanakan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Negeri Negeri Lima pada tanggal 08 April 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1980 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|-------|------------|
| 1.-- Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2.-- Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3.-- Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,00 |
| 4.-- PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5.-- Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6.-- Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)